

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
PLAZA BANDAR JAYA, LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

Ernawati



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF TRADITIONAL MARKET MANAGEMENT OF PLAZA BANDAR JAYA, LAMPUNG TENGAH

By:

Ernawati

Traditional market Plaza Bandar Jaya is the largest traditional market in Lampung Tengah. The market is a property belong to local government but it doesn't have definite regulation to manage it. So management of this market is still governed by Presidential Regulation (Perpres) number 112/2007 about traditional market management. In addition to that this market has various classical problems that doesn't have any solution yet, even though it has been built more than 15 years.

This research focus on the policy of traditional market management that is Perpres number 112 / 2007 about traditional market management. The purpose of this research is to evaluate the policy of traditional market management of plaza Bandar Jaya. Type of this research is descriptive qualitative. The location of research is in Market Department of Lampung Tengah and Plaza Bandar Jaya. Collecting data method used are interview, observation, and documentation.

The conclusion of this research is this policy may not effective in its implementation, this can be seen from the main points of the policies that doesn't have run well. This policy also not efficient in for human resources, which is lack of labor to manage the market, but it has been efficient in term of time, this can be seen from various problems that have been handled. According to the manager of this market, this policy doesn't fulfill the aspect of adequacy, but the need of society have been already fullfiled by the presence of plaza and its management. This policy gets a good response from the society for its good construction and for the management that are considered better than before.

Keywords: evaluation , policy , market .

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PLAZA BANDAR JAYA, LAMPUNG TENGAH

Oleh :

Ernawati

Pasar tradisional Plaza Bandar Jaya adalah pasar tradisional terbesar di Lampung Tengah. Pasar yang dibangun atas nama pemerintah daerah ini belum memiliki peraturan secara khusus dalam pengelolaannya, sehingga sampai saat ini pasar ini secara umum diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar tradisional. Selain itu pasar ini memiliki berbagai permasalahan klasik yang tak kunjung mendapat perbaikan meskipun telah dibangun lebih dari 15 tahun yang lalu.

Penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan pengelolaan pasar tradisional yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional Plaza Bandar Jaya. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Pasar Lampung Tengah dan Plaza Bandar Jaya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan ini belumlah efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari poin utama dalam kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Kebijakan ini pula belum efisien dalam hal sumber daya manusia, di mana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar, namun telah efisien dalam hal waktu, hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang telah ditangani. Menurut pihak pengelola, kebijakan ini belum memenuhi kecukupan, namun masyarakat telah merasa tercukupi kebutuhannya dengan keberadaan plaza dan pengelolaannya. Kebijakan ini pula mendapat respon yang baik dari masyarakat atas dibangunnya plaza ini serta pengelolaannya yang dianggap sudah lebih baik dari pada pasar sebelumnya.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pasar.

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
PLAZA BANDAR JAYA, LAMPUNG TENGAH**

Oleh

Ernawati

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL PLAZA BANDAR
JAYA, LAMPUNG TENGAH**

Nama

: Ernawati

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1216041038

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Dr. Bambang Utoyo, M.Si
NIP. 19630206 198803 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Bambang Utoyo, M.Si

Penguji Utama

: Meiliyana, S.IP, M.A

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 28 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



Ernawati

1216041038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Indra Putra Subing pada tanggal 31 Oktober 1993. Penulis merupakan putri kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Abu Bakar dan ibu Siti Rohmah. Penulis menempuh pendidikan formal di TK An-Nur Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2000, kemudian penulis melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 2 Indra Putra Subing dan menyelesaikan studinya pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2009 dan setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu di SMA Kartikatama Metro yang selesai pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis pada Tahun 2012.

Pada Januari Tahun 2015 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiuh Agung Jaya, Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, penulis mengikuti beberapa organisasi internal kampus

seperti BEM U Unila sebagai staff sekretaris kabinet pada tahun 2012-2015, kemudian terdaftar juga dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ESo di bidang *Debate* pada tahun 2012-2013, kemudian pada UKM Rakanila (Radio Kampus Unila) pada tahun 2012 dan yang terakhir pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Anggota Bidang Hubungan Luar (Hublu).

MOTTO

*Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan
Tuhan-Mu, sesungguhnya kamu berada
dalam penglihatan Kami*

(QS. At-Tur: 48)

*Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu
maka Allah akan memudahkan baginya jalan
ke surga*

(HR. Muslim)

*Jangan pernah takut menjalani hidup,
kuncinya itu sabar dan bersyukur. Percoyo
karo seng gawe urip.*

(Akad. S)

*Niatkan saja semua yang terbaik, bagaimana
jalannya, biar Allah yang mengatur.*

(Ernawati)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada

*Allah SWT Tuhan semesta alam sang maha pengasih
lagi maha penyayang.*

*Ibu dan Bapakku Tercinta, terimakasih atas doa'a,
kasih sayang serta pengorbanan selama ini, yang telah
mendidik dengan penuh kesabaran, dan selalu
memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan
karya ini.*

Kakak dan Adikku yang selalu aku sayangi.

Almamater tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang diakhiri dengan penulisan skripsi. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015) adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dari awal pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini, namun berkat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak pak, semoga

keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.AN., M.PA selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih pak sudah meyetujui *outline* yang penulis ajukan sebagai tonggak awal bagi penulis dalam mengawali skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan saran dan masukan selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh staf pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Trimakasih kepada Eko Budi Sulistio, Pak Noverman Duadji, Pak Syamsul Maarif, Bu Rahayu Sulistiowati, Pak Izul, Prof. Yulianto, pak Nana Mulyana, Bu Dewie Brima Atika, Bu Devi Yulianti, Bu Selvi, Bu Dian Kagungan, Bu Indriyanti, Bu Intan, Bu Ani Agus Puspawati.
7. Seluruh Pihak Informan dan Pihak Dinas Pasar Lampung Tengah selaku Pengelola Plaza Bandar Jaya yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Staff Administrasi jurusan, Ibu Nur Aini yang telah banyak membantu dalam mengurus administrasi selama penyusunan skripsi ini hingga selesai serta terimakasih banyak untuk kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi kami yang selalu memenuhi ruangan ibu, terimakasih juga sudah jadi teman curhat yang baik untuk kita semua.
9. Staf ruang baca Fisip, Mbak Diah, Mbak Mila dan Bang Reza. Terimakasih banyak sudah banyak membantu, maafkan kita yang selalu memenuhi ruang baca dengan kegaduhan, terutama suara saya yang paling berisik (maafin ya mbak, bang :D), terimakasih juga buat mbak diah dan mbak mila sudah jadi mbak dan teman yang menyenangkan, apa lagi mbak diah yang selalu ketawa gak ada abisnya. Love you..
10. Sixwahe dan dua anak gadis kita. Ada Novi si emak of sixwahe, makasih ya udah selalu ngurusin setiap momen indah kita, makasih udah jadi pemimpin dan pengingat yang luar biasa, Anisa (Dubipata) yang pinter dan berprestasi, selalu nyambung buat share soal pendidikan dan masa depan, yang paling bisa ngeluarin kata-kata tidak terduga yang bikin ngekek, tapi gak tau kenapa selalu aja mincing gw buat berdebat -___-, ada Ria teman curhat terbaikku, yang gak pernah kehabisan cara buat menggila bareng, wisata kuliner bareng, dan temen kena marah bareng sama novi karena ulah konyol dan sama-sama boros yang gak ketulungan :D. Ada Ridha yang always stay cool, selalu kalem dalam situasi apapun, paling rajin ngeberesin barang-barangnya sixwahe (terutama tas gw :D), paling sabar di antara kita semua, dan paling cantik apa lagi kalo pas mijitin tangan dedek ini walaupun kadang suka lola, hehehe. Ada Lina si manusia hantu yang sukanya ilang-ilangan, yang gak

pernah telat pulkam, dan suka tepat kalo ngomong. Guruh, anak gadisnya sixwahe yang sholeha, konyol, gak pernah mau di ajak foto bareng, suka ngerebut jatah makanan gw, dan ntah kenapa bisa satu daerah sama gw, sama-sama dari Bandar Jaya hanya saja kita beda kasta karena gw berasal dari kampung wisata, bukan dari pingled. Hahaha. Dan yang terakhir ada mas ageng si anak gadis dan mamasnya sixwahe yang always stay cool, stay calm, smart dan baik hati (peres) wkwkwk. Pokoknya, tengkyu gengs buat 4 tahun yang luar biasa, semoga persaudaraan kita selalu langgeng ya.. love u all..

11. My belove manik-manik crew. Ada kesayangan aku, cinta aku, lope-lopenya aku Firdalia, makasih syng sudah merelakan kosan mu jadi tempat bernaungku setiap hari, makasih selalu nemenin aku kemana aja, selalu dengerin ocehan aku yang gak ada abisnya, selalu keujanan berdua, selalu nurutin maunya aku, selalu mau buat aku repotin dan selalu ada buat aku, pokoknya love u bgt bgt bgt. Ada Yuyun Fitriani yang gak kalah berisiknya sama aku, yang gak ada berentinya kalo cerita, apa lagi kalo udah ketawa rasanya lega bgt.. makasih ya yun, sudah bersedia menampung aku di kosan kamu, apa lagi kalo pas kosan aku gk ada aer. Haha. Ada Ratih Sukmawati si cewek datar ekspresi dan suka bikin ngekek sama cerita-ceritanya yang katanya sekarang udah move on dari mantan haha. Ada Nena cantik yang selalu hits everywhere, cetar membahana ulala. Ada Fitri Ristiana sholeha yang ekspresinya selalu tidak terduga, yang selalu heboh kalo cerita, yang selalu telaten nulis waktu dikelas dan suka gambar apa aja di telapak tangan aku, so love it! Makasih ya piti udah mau jadi tempat bersandar nya aku, selalu meluk dan cium aku, selalu menginspirasi aku. Love u full gaeess...

12. Seluruh Keluarga Administrasi Negara (012) kelas genap: Infantri fotografernya sixwahe yang kece badai, Dewi yang polos tapi suka oon, Icha si gadis padang yang selalu rindu rumah, Merita si gadis medsos, Suci yang selalu sabar, Elin yang kadang suka lola, Imah sholeha yang bercita-cita cepet gemuk, Rani si cewek judes yang makannya banyak tapi selalu langsing, Kirana yang kalo berangkat ngampus selalu mandi keringat, Yeen yang gila korea, Andre si lelaki penuh obsesi dengan nilai terbaik, Fajar sang lee min ho yang baik hati dan cerdas, Johan si bujang waykanan yang hobi debat, Topik si fotografer yang gak mau disebut fotografer, Sholeh yang semoga lekas diberi hidayah unuk memilih, Bli Putu yang baik banget dan ramah tamah, Eko yang penuh prestasi, Ikhwan yang selalu negombalin cewe-cewe ampera tapi menyenangkan, Mamat si sipit yang baik hati, Rifki Cibi sang Bussinessman, Bery yang fans nya dimana-mana, uda Rezki yang baik walaupun bayar arisannya telat, Aris si ketua adatnya ampera, Alan yang jago stand up comedy, Ayu widya , Nadiril, Maya, Aliza, Emi, Tiara, Dianisa, Putri Wijayanti, Yogi, irlan, Kiki, Akbar, Satria serta teman-teman di kelas ganjil: Endry, Rifki Nyum, ikhsan, Quma, Firdaus, Hamdani, Alex, Yuli, Ana, Ajijah, Mb Mona, Putri Pewe, Frisca, Serli, Anggi, Dara, Melda, Oliva, Stefani, Anisa, Ali, dan teman-teman yang lainnya, terimakasih atas bantuan, dukungan, dan kebersamaannya selama ini dari teman-teman semua , saya sangat bersyukur mengenal kalian semua. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. *Keep solid Ampera.*

13. Teman-teman KKN di Tiyuh Agung Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat periode Januari-Februari 2015. Bang

Bainal, Bang Fajar, Dwi, Ari, Ira, Titian, Putri, terimakasih telah menjadi bagian dalam menjalankan progja-progja selama KKN berlangsung, serta terimakasih kepada Induk Semang kami: Bapak Gito dan Ibu Selfi, Pak Tatok, Ibu Hindun, Ibu Darwati, mbah Inem, serta keluarga besar di Tiyuh Agung Jaya.

14. All my room mate, Elisabet, Riska, Yuli, Mumu, Cecha, Devi, Janah. Terimakasih sudah menciptakan kenangan luar biasa selama 4 tahun ini, makasih untuk semua pengertian, kasih sayang, kelakuan gila kalian. Makasih udah buat hari-hariku selalu indah dan buat aku selalu betah ada di rumah kita. So love you gaesss.. cinta banget sama kalian.
15. Sahabat kecilku yang tak pernah absen dari hampir setiap momen sedih dan bahagiaku, Bowo, Yudi, Erwan, Agung, Lita, Nisa, Rumiya, dan Putri.
16. Ibu dan Papi tercinta, terimakasih untuk cinta kalian yang luar biasa, terimakasih untuk kasih sayang tak terbatas yang tak mungkin akan aku dapatkan dari siapapun. Terimakasih untuk semua doa-doa yang insya allah selalu di ijabah sama allah. Buk.. Pi.. Erna udah Sarjana.. :)
17. Teruntuk rumah kedua ku. Mas Akad terimakasih telah menjadi orang luar biasa yang hadir dalam hidupku, makasih udah jadi kakak dan ayah yang hebat buat itah, makasih buat semua support materi selama ini sampai itah udah berhasil menggapai sarjana, makasih udah selalu ngebimbing dan mengiri serta mempersiapkan itah jadi wanita yang kuat dan berani untuk menghadapi dunianya orang dewasa. Mbak ku semata wayang yang selalu aku cintai, makasih udah jadi mbak dan bunda yang selalu menyenangkan, makasih udah mau jadi temen curhat yang baik buat aku, makasih buat semua

kasih sayangnya, makasih udah selalu ngurusin itah, so love u mbakku Siti Nur Handayani. Dan untuk ponakan kesayangannya itah Syifa Adisty Chaismara, itah sayang banget sama ipa, makasih sayang udah selalu buat hari-hari itah di rumah selalu berwarna, makasih udah jadi ponakan itah yang pinter, sholeha, dan ceria. Itah sayang banget sama kalian semua.

18. Kakak dan adik ku, daying Buhari, Ratu minah, Batin is, Sri, Ahi Iwan, ohta yuni, adek emi, adek ilham, makasih buat semua doa, dukungan, dan cinta kalian yang luar biasa, makasih udah jadi keluarga yang luar biasa buat itah. Itah sayang dan cinta banget sama kalian.
19. Sepupu-sepupuku tercinta, adek maya, uni eka, ayuk siti, ayuk ratna, mas Khoir, adek Angga, Vina, Putri, Mas Ayat, daying iyan, adin rudi dan yang lainnya yang gak bisa di sebutin satu-satu, makasih banyak buat semua cinta dan kasih sayang kalian. Makasih buat doa dan support kalian yang luar biasa. Love u all..
20. Serta rekan-rekan yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan.

Karya tulis ini adalah karya terbaik yang pernah peneliti tulis dengan mencurahkan seluruh pemikiran, perasaan, dan tenaga. Namun sebagai peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Akan tetapi penulis

berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2016
Penulis

Ernawati

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	13
B. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik.....	16
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	17
2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	19
3. Tipe-Tipe Riset Evaluasi Kebijakan Publik.....	21
4. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik	23
C. Tinjauan tentang Tata Kelola Pasar	28
1. Pengertian Tata Kelola.....	28
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pasar	28
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	50

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah	53
B. Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah	55
1. Profil Dinas Pasar KAbupaten Lampung Tengah	55
2. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah	57
C. Gambaran Umum Pasar Tradisional Bandar Jaya Plaza.....	59

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	61
1. Efektivitas.....	61
2. Efisiensi	69
3. Kecukupan.....	77
4. Responsivitas.....	82
B. Pembahasan	85
1. Efektivitas.....	86
2. Efisiensi	90
3. Kecukupan.....	94
4. Responsivitas.....	96

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	98
B. Saran	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kriteria Evaluasi	23
2. Daftar Informan.....	47
3. Daftar Karyawan Dinas Pasar Lampung Tengah.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Pedagang yang menempati sebagian badan jalan..	8
2. Jalanan sebelah utara Plaza Bandar Jaya	9
3. Kerangka Pikir	35
4. Struktur Organisasi Dinas Pasar Lampung Tengah	57
5. Permasalahan sampah di Plaza Bandar Jaya.....	66
6. Bagian belakang plaza yang terlihat kumuh	67
7. Pedagang yang menempati jalan di tengah plaza.....	73
8. Keadaan jalan di sekitar Plaza Bandar Jaya.....	79
9. Pedagang yang menempati sebagian badan jalan	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah digantikan dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Suaedi (2010:14) peran pemerintah yang moderat adalah terwujudnya pemerintah yang mampu:

- a. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b. Memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan internal dan eksternal;
- c. Menjamin keadilan dalam dinamika ekonomi dan persaingan usaha;
- d. Menjamin keberlanjutan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Keempat peran tersebut merupakan permaknaan kembali terhadap tujuan Negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945, yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman.

Alexander (1994) mengatakan bahwa pembangunan (*development*) merupakan sebuah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. (<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>, diakses pada 28 september 2015). Bratakusumah dan Solihin (2001:186)

menyebutkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat maka dibangunlah fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar dimana fungsinya adalah melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, sangat dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dan terintergritas. Hal ini dilakukan demi mendapatkan pasar yang lebih profesional baik demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen/pelanggan.

Menurut Sulistio (2012:3) kebijakan publik merupakan sebuah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik bersama-sama dengan

aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh rakyat. Dunn (2003:24) menjelaskan dalam sebuah kebijakan terdapat lima tahap, yaitu yang pertama penyusunan agenda, di mana dalam tahap ini, pembuat kebijakan memilah dan memilih masalah mana yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan merumuskan kebijakan melalui pemilihan alternatif pemecahan masalah yang sebelumnya telah dipilih berdasarkan urgensinya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu legitimasi kebijakan. Legitimasi kebijakan adalah sebuah tahap di mana tujuannya untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini alternatif-alternatif pemecahan masalah yang telah disepakati dilaksanakan. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang dilakukan dalam semua tahap dalam kebijakan.

Menurut Suharno, (2013:219) Kegiatan evaluasi kebijakan publik adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dalam analisis sebuah kebijakan. Hal ini ditujukan untuk memberikan penilaian-penilaian tertentu sejauh mana pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kebijakan publik dilaksanakan dengan maksud tertentu guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Tak dapat dipungkiri, setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tidak lah selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Berbagai masalah yang dihadapi membuat kebijakan publik tidak selalu dapat meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya menurut Winarno, (2014:228) perlu dilakukan sebuah evaluasi, guna

melihat apa yang sebenarnya menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Badjuri dan Yuwono dalam Tangkilisan (2003;19) dalam konteks kebijakan publik di Indonesia tahapan yang cukup penting dan cukup sering terlupakan efektivitasnya adalah evaluasi kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar kebijakan publik di Indonesia secara formal telah dilakukan evaluasi dengan baik. Namun demikian substansi kebijakan tersebut ternyata tidak tercapai secara efektif, bahkan sebagian lagi mengalami kegagalan. Selanjutnya Jones (1997) mengemukakan bahwa evaluasi suatu kebijakan publik berarti dilakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan perbaikan dari dampak yang tidak diinginkan. Sehingga dapat meminimalisir serta mencegah dampak yang tidak diinginkan selama kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut Nugroho (2008:471) ada dua alasan pokok mengapa evaluasi kebijakan publik harus dilakukan:

1. menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia, yaitu “ganti pejabat, harus ganti peraturan”.
2. Setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta merta karena “keinginan” atau “selera” pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan publik.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya sebuah evaluasi, khususnya dalam rangka penanaman urgensi pencapaian tujuan substansial dari sebuah kebijakan, bukan formalitas semu semata.

Seperti halnya kebijakan lainnya, pengaturan atau pengelolaan sebuah pasar tradisional secara umum telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Di mana dalam peraturan tersebut telah dituliskan bagaimana mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional. Salah satu pasal dalam peraturan presiden tersebut yaitu Pasal 6 menyebutkan bahwa Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasar tradisional Plaza Bandar Jaya merupakan salah satu pasar sentral yang berada di Lampung Tengah. Menurut data yang dimiliki Dinas Pasar menyebutkan bahwa pasar ini adalah pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Lampung Tengah dengan luas 22.000 meter persegi dengan jumlah pedagang sekaligus pemilik toko lebih dari 1.600 orang di dalamnya. Plaza Bandar Jaya ini merupakan salah satu asset besar yang dimiliki oleh Lampung Tengah yang dibangun dan dimiliki atas nama Pemerintah Daerah Lampung Tengah. Namun demikian, meskipun plaza ini adalah milik Pemerintah Daerah kebijakan yang mengatur dan mengelola Plaza Bandar Jaya secara umum masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar tradisional. Itu artinya Pemerintah Daerah Lampung Tengah

belum memiliki kebijakan sendiri yang berupa Peraturan Daerah guna secara khusus mengatur dan mengelola Plaza Bandar Jaya.

Keberadaan pasar tradisional Bandar Jaya adalah kebutuhan vital yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat Lampung Tengah. Keberadaanya yang strategis, yang berada tepat bersebelahan dengan Jalan Lintas Sumatera ini menjadikan pasar tradisional Bandar Jaya menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Lampung Tengah yang mudah untuk di akses dari berbagai daerah sekitar Lampung Tengah. Namun sayang, ditengah persaingan keras kapitalisme keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah rupanya tak sebanding dengan pergerakan pasar modern yang semakin pesat yang merambah hingga ke pelosok daerah. Citra pasar tradisional yang buruk, seperti becek, kumuh, *semrawut*, ketidakpastian harga hingga alasan gengsi membuat banyak masyarakat kini beralih ke pasar modern dan perlahan meninggalkan pasar tradisional. Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus-menerus berbelanja di pasar-pasar modern. Selain itu, keadaan pasar yang *semrawut* tentu membuat pemandangan tidak sedap menjadi potret utama tata kota yang buruk bagi daerah tersebut.

Menghadapi permasalahan ini, pemerintah daerah Lampung Tengah telah melakukan upaya perbaikan pasar tradisional Bandar Jaya dengan membangun Plaza Bandar Jaya yang bermitra dengan PT. Kitita Alami sebagai pengelola lantai 2 dan 2.5 guna pengadaan tata kota yang lebih baik. Namun, upaya ini ternyata berujung pada

permasalahan baru karena banyak pedagang lama yang tersingkir akibat tidak mampu membeli kios baru. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, harga kios/toko yang berada dalam plaza berkisaran Rp. 17.000.000,- hingga Rp. 275.000.000,- tergantung dari ukuran kios dan lokasinya di dalam plaza. Harga jual/sewa kios yang mahal membuat sebagian besar pedagang kecil pasar tradisional lama harus memutar otak untuk tetap dapat berjualan di sekitar Bandar Jaya. Pada dasarnya, pembangunan plaza ini dibangun guna penataan pasar yang lebih baik melalui pengorganisir para pedagang kecil di pasar tradisional Bandar Jaya. Namun faktanya, sewa kios yang cukup mahal tidak membuat semua pedagang kecil mampu untuk membeli atau menyewa kios yang berada di dalam plaza Bandar Jaya.

Ketidakmampuan pedagang kecil dalam menyewa kios tentu tidak membuat mereka berhenti untuk berdagang di Bandar Jaya. Sebagian besar dari mereka yang tidak mampu menyewa kios, kini menempati hampir dari setengah jalan utama utara dan trotoar sekitar plaza Bandar Jaya ini.



Gambar I. Pedagang yang menempati sebagian badan jalan.



Gambar II. Jalanan sebelah utara Plaza Bandar Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi peneliti 2016

Membludaknya pedagang yang menempati hampir setengah badan jalan, kini menimbulkan berbagai permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Seperti kemacetan parah yang bisa dipastikan akan terjadi setiap pagi di persimpangan jalan sebelah utara, timur dan selatan plaza Bandar Jaya. Selain kemacetan parah, para pedagang jalanan ini juga membuat keberadaan pungutan liar (pungli) semakin meraja lela. Sejumlah uang harus dibayarkan oleh para pedagang kecil ini kepada beberapa oknum yang tidak diketahui jelas kegunaanya dan mengalir kemana uang tersebut. Tidak berhenti sampai disini permasalahan yang terjadi, sampah berserakan dimana-mana serta kurangnya drainase yang membuat keadaan semakin kumuh rupanya menjadi pemandangan yang biasa terlihat disekitar plaza Bandar Jaya. Bahkan jalanan rusak yang tak kunjung mendapat perbaikan, seolah menjadi pemandangan *lumrah* setiap hari bagi para pengguna jalan raya disekitar plaza.

Seiring perjalanan Plaza Bandar Jaya dibangun atas kerja sama pemerintah daerah dan PT Kitita Alami yang difasilitasi oleh Dinas Pasar ini mengalami berbagai permasalahan pula selain permasalahan lapangan seperti yang telah disebutkan di atas. Secara administrasi pemerintah daerah kehilangan mitranya yang sebelumnya memiliki andil cukup besar dalam pengelolaan Plaza Bandar Jaya, yaitu PT Kitita Alami. Perusahaan yang berkantor di Jakarta tersebut mengalami kebangkrutan sehingga harus menarik diri dari kerja sama pengelolaan Plaza Bandar Jaya. Sehingga kini, pengelolaan plaza tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada Dinas Pasar hingga kembali mendapatkan mitra barunya untuk mengelola pasar. Oleh sebab itu pula, kini timbul berbagai permasalahan di lapangan karena pengelolaannya yang hanya dilakukan oleh Dinas Pasar dan permasalahan ini menunjukkan masih banyak pelaksanaan pengelolaan pasar yang belum sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar tradisional.

Dari begitu banyak permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana kebijakan pengelolaan pasar tradisional Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah?”**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran hasil evaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 terhadap pengelolaan pasar tradisional Plaz Bandar Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang Administrasi Negara yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik dan tata kelola pasar.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji evaluasi kebijakan dalam tata kelola pasar serta sebagai rekomendasi evaluasi dalam rangka perbaikan tata kelola pasar yang lebih baik.
- b. Penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu bahan rujukan bagi Dinas Pasar dan PT. Kitita Alami dalam evaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional plaza Bandar Jaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan publik

Pada dasarnya, suatu kebijakan sangatlah berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Winarno dan Wahab dalam Suharno (2013:3) sepakat bahwa istilah kebijakan dalam penggunaannya kerap kali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan *grand design*. Bagi para pembuat kebijakan, mungkin istilah-istilah tersebut tidak bermasalah. Namun bagi mereka yang berada diluar stuktur pembuat/pengambil kebijakan, mungkin hal ini akan membingungkan. Menurut Suharno (2013:3) terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*), karena pada dasarnya setiap ahli memiliki pengertian dan makna masing-masing dari setiap kebijakan. Dari pengertian tersebut akan menghasilkan penekanan-penekanan tersendiri yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula.

1. Pengertian Kebijakan publik

Menurut Sulistio (2012:3) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat. Nugroho (2011:96) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masa masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan/atau bersama dengan para aktor politik dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan publik guna mencapai tujuan yang diinginkan demi kepentingan khalayak ramai.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Telah diuraikan di atas mengenai apa itu kebijakan publik. Secara sederhana dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah produk (*output*) pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemecahan masalah-masalah publik yang dianggap *urgent* demi kesejahteraan masyarakat. Pengadaan sebuah produk yang dalam hal ini adalah sebuah kebijakan publik, bukanlah barang instan yang serta-merta hadir seketika ketika datang sebuah permasalahan publik, tentu terdapat proses

atau tahapan-tahapan dalam pembuatan sebuah kebijakan. Seperti yang dijelaskan William Dunn (1998:24) bahwa tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Agenda *setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam tahapan kebijakan publik. Dalam fase inilah kemudian ditentukan mana permasalahan publik dan prioritas yang menjadi urgensi pada saat itu. Jika sebuah isu publik mendapatkan kedudukan sebagai masalah publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu publik tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu publik lainnya.

Dalam fase ini sangat penting untuk dapat menentukan isu kebijakan yang akan dijadikan masalah kebijakan dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan biasanya muncul ketika terjadi perang pendapat antar aktor mengenai tindakan yang akan maupun yang telah ditempuh, maupun pertentangan mengenai nilai pandang dari karakter masalah tersebut.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah berhasil masuk dalam agenda pemerintah, kemudian diolah dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan untuk dapat ditemukan alternatif-alternatif kebijakan sebagai solusi dari masalah kebijakan tersebut. Sama halnya dengan pemilihan isu masalah, pemilihan alternatif kebijakan sebagai solusi pemecahan masalah kebijakan juga dipilih dan diseleksi agar didapat pilihan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah kebijakan.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah tindakan yang sah, yaitu dengan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementers*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi merupakan fase atau tahapan fungsional yang berkaitan dengan estimasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya sekedar

sebuah tahapan yang akan dilakukan pada agenda terakhir sebuah proses kebijakan. Namun juga mencakup seluruh aspek dalam sebuah kebijakan. Mulai dari perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri.

B. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik

Kegiatan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang penting dalam proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai terhadap suatu kebijakan publik yang diimplementasikan (Suharno, 2013:219). Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, yaitu untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan public dapat meraih hasil seperti yang diinginkan. Oleh karenanya, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut memiliki dampak seperti yang diharapkan. Suharno (2013:221) mengatakan, salah satu alasan mengapa sebuah evaluasi harus dilaksanakan jika ditinjau dari dimensi internal, yaitu untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Sebab, informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa, atau kebijakan lainnya dalam masa yang akan datang. Sejalan dengan alasan internal kedua yang dikemukakan oleh Suharno (2013:221) bahwa alasan

dilakukannya sebuah evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan, dalam penelitian ini pula hal yang sama dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui apakah pembangunan dan pelaksanaan tata kelola plaza Bandar Jaya telah sesuai dan berhasil dengan tujuan dari pembangunan dan pelaksanaan tata kelola plaza Bandar Jaya.

1. Pengertian Evaluasi kebijakan

Menurut Winarno (2014:228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Anderson dalam Sulistio (2012:52), Evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Sebuah evaluasi kebijakan erat kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Karena setiap kebijakan akan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebuah evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh kesenjangan antara “harapan” dan kenyataan.

Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini berdasarkan kata kunci yang sering kita temukan yaitu di antaranya adalah pengukuran, penilaian, pelaksanaan, hasil dan dampak.

Dilihat dari urgensi pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis perlu mengetahui berbagai pendekatan evaluasi yang kelak akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi itu sendiri, di antaranya adalah sebagai berikut:

2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Suharno (2013:224-227) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni:

a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini berpendapat bahwa nilai dan manfaat suatu kebijakan akan dirasakan secara otomatis dan terbukti dengan sendirinya oleh individu, kelompok, maupun masyarakat.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi valid dengan metode-metode deskriptif mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif lainnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa pencapaian dari tujuan yang telah diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk menilai dan mengevaluasi dari manfaat dari sebuah kebijakan.

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi yang bersifat sumatif adalah evaluasi yang segera dilakukan setelah sebuah kebijakan selesai dilaksanakan yang telah ditetapkan jangka waktunya, baik itu jangka pendek

maupun menengah. Sedangkan evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang agar dapat terus memantau pencapaian target dan tujuan dari sebuah kebijakan.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan.

Perbedaan mendasar evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan evaluasi sebelumnya adalah bahwa evaluasi ini berusaha untuk menemukan dan mengeksplisitkan apa yang menjadi target dan tujuan dari para pelaku kebijakan, baik itu yang nyata maupun tersembunyi. Sehingga, individu maupun lembaga yang melaksanakan kebijakan baik dari level terendah hingga yang paling tinggi dilibatkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan.

Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi keputusan teoritis, yaitu penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*) dan analisis utilitas multi atribut. Penilaian evaluabilitas adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menganalisis sistem pembuatan keputusan. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan kinerja kebijakan, serta memperjelas apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan asumsi-asumsi yang dicapai dengan kinerja tersebut. Sedangkan analisis utilitas multi

atribut adalah serangkaian prosedur yang ditetapkan guna memperoleh penilaian subjektif terhadap para pelaku kebijakan mengenai nilai dari hasil sebuah kebijakan. Analisis ini dapat menunjukkan secara eksplisit penentuan nilai dari para pelaku kebijakan serta keragaman tujuan para pelaku kebijakan.

3. Tipe-Tipe Riset Evaluasi Kebijakan Publik

Langbein dalam Widodo (2001:215) menyebutkan terdapat 2 (dua) tipe riset evaluasi (*type of evaluation research*) yaitu riset *process* dan riset *outcomes*, dan metodenya dibedakan menjadi 2 (dua) juga, yaitu metode deskriptif dan metode kausal. Riset yang memfokuskan pada proses, maka ia akan senantiasa mendasarkan pada *guide line*, yaitu tentang bagaimana prosedur dan administrasinya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Dengan kata lain, yang menjadi indikator keberhasilan sebuah kebijakan dalam tipe riset ini adalah kesesuaian proses implementasi sebuah kebijakan publik melalui garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditentukan. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar dalam riset evaluasi proses, di antaranya: apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk/pedoman yang telah ditetapkan; apakah fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam kebijakan telah terpenuhi; bagaimana derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan telah dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*). Sedangkan riset evaluasi *outcomes* merupakan sebuah evaluasi yang berusaha melihat *outcomes* atau *impact* dari suatu program/kebijakan.

Henry dalam Wiyoto (2005:55-76) mengidentifikasikan riset evaluasi ke dalam 7 (tujuh) tipe utama, yaitu:

- a) *Front-end Analyses* (evaluasi perencanaan program), merupakan riset evaluasi yang dikembangkan sebelum keputusan tentang sebuah program baru ditetapkan atau sebuah program dilanjutkan.
- b) *Evaluability Assessment*, merupakan riset evaluasi yang dilakukan dengan jalan membandingkan asumsi kebijakan yang mendasari sebuah program tersebut, serta menilai rasionalitas asumsi yang dibuat dan kemungkinan (peluang) program dapat mencapai sasarannya.
- c) *Cost-Benefit and Cost-Effectiveness Analyses* (riset tentang efisiensi program), merupakan tipe evaluasi yang dilakukan dengan teknik membandingkan *outputs* dan atau *outcomes* sebuah program, dengan sumber daya yang telah dikeluarkan.
- d) *Proses or Implementation Evaluation*, merupakan riset evaluasi program dengan menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Artinya, mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada dalam suatu program. Isu strategik yang terdapat pada riset ini, yaitu: *How did the programme operate?*, atau *What happened*, atau *What the program do?*
- e) *Effectiveness, outcomes, or Impact Evaluation*, merupakan riset evaluasi yang ditujukan untuk menilai sejauh mana sebuah program mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Riset ini memfokuskan pada *output* dan *outcomes*.
- f) *Program and Problem Monitoring* (riset problem monitoring), merupakan tipe riset evaluasi yang memberikan informasi pada program dan problemnya, atau paling tidak tentang rekaman yang terjadi baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang di dalam sebuah variasi wilayah yang dilakukan secara simultan.

- g) *Meta-Evaluation, Evaluation Syntheses or Comprehensive Evaluation*, merupakan tipe evaluasi yang berusaha menganalisis kembali temuan-temuan dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan untuk menemukan apa yang dapat dipelajari dari yang telah terjadi tentang sebuah program/kebijakan publik.

4. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara

Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien
-----------	--	---

Sumber: Dunn, (2003:610)

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter” (Dunn, 2003:429).

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas

ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Adapun menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, menurut Dunn, (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn, (2003:437) pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”

6. Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Melihat dari kriteria yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian dari William N. Dunn sebagai bahan dasar acuan dalam penelitian. Merujuk pada berbagai permasalahan yang telah diungkapkan pada sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti hanya akan menggunakan empat kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas.

C. Tinjauan Tentang Tata Kelola Pasar

1. Pengertian Tata Kelola

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”. etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno “*Gouvernance*” yang berarti pengendalian (*control*) atau regulated dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*). Sering kali metafora yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*) (http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona_TATA_KELOLA diakses pada 28 September 2015). Secara harfiah *Governance* di tanah air kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”, akan tetapi sebenarnya masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Perlu juga dipahami bahwa menurut Winarno (2000) *Governance* tidak bisa atau tidak tepat diterjemahkan sebagai pemerintah, sekalipun banyak pihak yang mengartikan demikian.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pasar

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang professional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas

hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.

Menurut Bayu Pramesona (2015) dalam sebuah situs Academia.Edu untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar, di antaranya :

a. Otonomi Pengelolaan Pasar

Otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki untuk dapat mengatur sendiri urusan diri sendiri. Dengan otonomi yang dimiliki, pengelola pasar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, pengelola pasar lebih berdaya dalam melaksanakan dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen secara otonomi memiliki arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi terbaik, karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi pasarnya.

b. Sistem pengelolaan yang terintegrasi

Tata kelola merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengadaan sebuah pasar yang baik. Pasar haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh aspek manajemen pasar terintegrasi dalam satu system. Keterpaduan system manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen yang professional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Pengelola pasar harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya

dalam hal pengelolaan pendapatan parkir, perencanaan, pembiayaan operasional, dan perawatan dari pengelolaan parkir. Pengelolaan sumber daya manusia harus di padukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar dalam penggajian dan kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan. Pengelolaan kebersihan dalam rangka perwujudan pasar yang bersih tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembiayaan operasional kebersihan. Pengelolaan pasar yang terintegrasi merupakan kunci bagi terciptanya profesionalisme manajemen pasar.

c. Memaksimalkan Pendapatan Pasar

Kelangsungan sebuah organisasi bisnis ditentukan oleh besaran penghasilan yang diperoleh oleh organisasi untuk membiayai kebutuhan operasional dan pengembangan organisasi tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan pasar. Keberlangsungan sebuah pasar ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar untuk membiayai operasional pasar.

Pendapatan pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber. Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Selain penggalan sumber pendapatan pasar, pengelola juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar.

d. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar

Keberadaan pasar tergantung dari keberadaan dan pengunjung pasar, tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Pedagang yang bejualan dalam suatu pasar memiliki ekspetasi terhadap tempat berdagang, diantaranya :

1. Tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar tersebut
2. Pasar yang bersih dan aman.
3. Harga sewa yang terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak
4. Minimnya penarikan retribusi
5. Ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan

Adapun ekspektasi pengunjung pasar diantaranya;

1. Pasar yang nyaman, aman, danbersih
2. Kelengkapan barang dagangan
3. Kepastian jam operasional pasar.

Untuk memenuhi ekspektasi seluruh pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara procedural dan sistemik. Berbagai pelayanan perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk menjadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pasar. Pengelola pasar juga harus terus menerus mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki pelayanan tersebut secara terus menerus.

e. Efisien

Efisien ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan mengorbankan sumber daya yang paling minimal. Sumber daya terutama biaya, waktu dan tenaga. Dalam hal ini proses-proses dilakukan selalu menghindari terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian yang tidak perlu. Proses efesiensi diukur dengan perbandingan antara *output* yang dicapai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan *output* tersebut. Dalam pengelolaan pasar banyak cara yang dapat dilakukan, dengan berbagai pilihan yang tersedia. Pengelola pasar harus bisa harus bisa menentukan pilhan-pilihan tersebut dengan prinsip efesiensi. Pengelolaan pasar harus menentukan pilihan-pilihan tersebut dengan prinsip efesiensi. Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji harian atau dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternative tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efesiensi.

D. Kerangka Berfikir Penelitian

Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

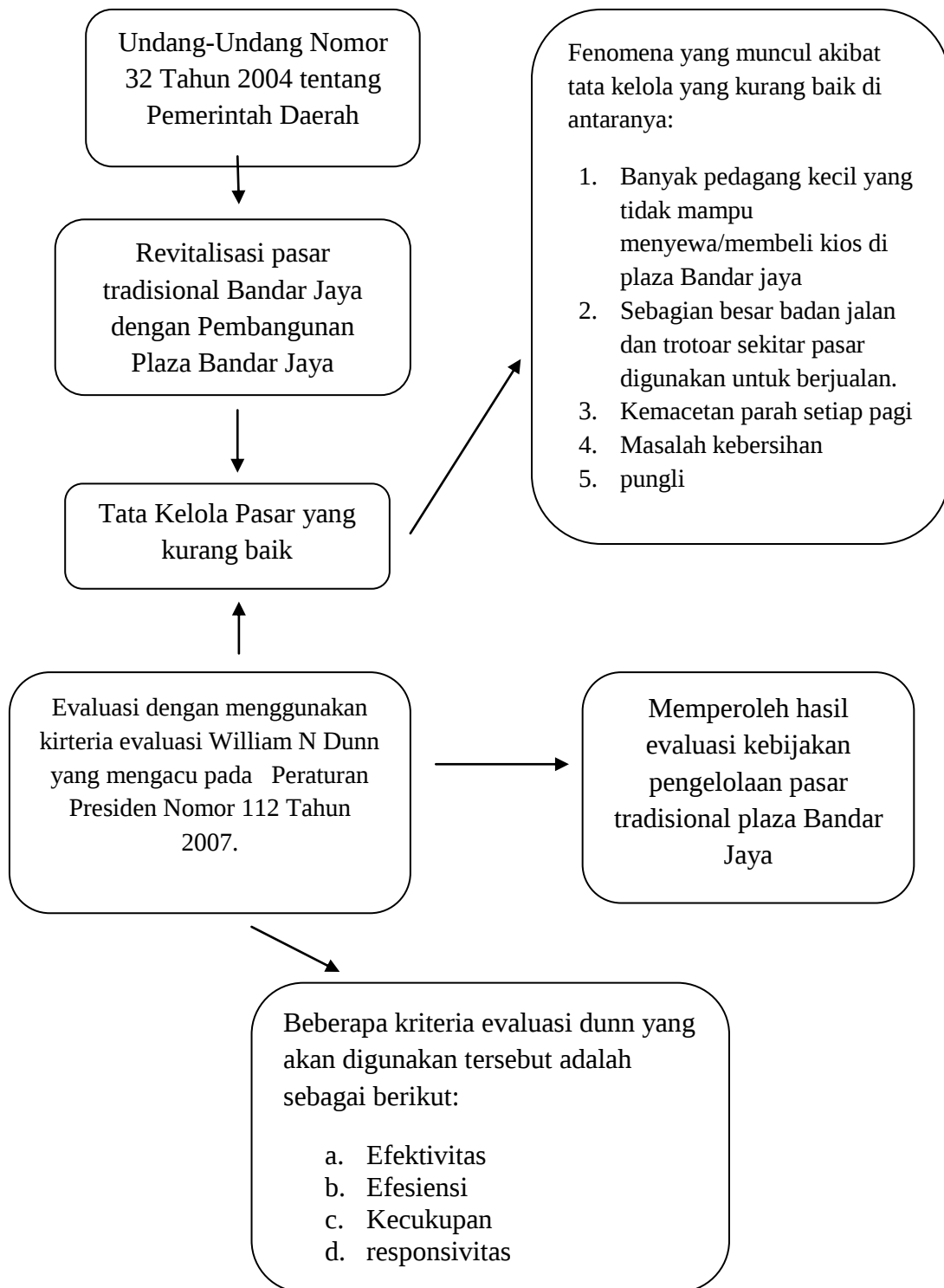
Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat ini maka dibangunlah fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Dimana fungsinya adalah melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, sangat dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dan terintegrasi. Hal ini dilakukan demi mendapatkan pasar yang lebih profesional baik demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen/pelanggan.

Melalui otonomi daerah ini kemudian dibangunlah sebuah Plaza Bandar Jaya yang merevitalisasi pasar tradisional sebelumnya yang berada di lokasi yang sama. Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan program pemerintah dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan masyarakat melalui sebuah pembangunan dan pelayanan.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat tentu bukanlah sekedar pembangunan yang hanya secara fisik. Namun juga dibutuhkan sebuah pengelolaan yang baik dan profesional untuk mencapai sebuah pasar yang nyaman bagi pedagang maupun para pelanggannya. Manajemen yang baik dan terintegrasi sudah tentu sangat diperlukan dalam pelaksanaan tata kelola pasar ini.

Namun nyatanya, fakta dilapangan kerap kali menunjukkan sesuatu hal yang kurang diinginkan oleh masyarakat. Seperti citra pasar tradisional yang buruk, SDM yang kurang memadai, tingkat keamanan yang kurang terjamin dll. Hal ini rupanya telah menjadi potret tersendiri yang dialami oleh pasar tradisional Plaza Bandar Jaya. Permasalahan-permasalahan kompleks seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang akan menjadi pemandangan umum yang akan kita temui saat kita mengunjungi pasar tradisional ini. Hal ini terjadi karena pengelolaan pasar yang kurang memperhatikan aspek-aspek manajemen yang baik dalam mengelola dan menjalankan sebuah pasar tradisional. Untuk itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 penulis akan mengevaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional plaza Bandar Jaya dengan menggunakan kriteria evaluasi oleh William N Dunn yang kemudian difokuskan pada empat (kriteria), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas.

Gambar I. Kerangka fikir penelitian



Sumber: diolah oleh peneliti 2016

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Strauss dan Cobin (dalam Tresiana, 2013:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara pengukuran. Bungin dan Creswell (dalam Tresiana, 2013:33) metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan memaparkan dengan cara mendeskripsikan hasil melalui gambaran pelaksanaan kegiatan dalam Plaza Bandar Jaya dengan berbagai fenomena permasalahan yang ada. Oleh sebab itu nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut dapat berasal dari narasah wawancara, catatan-catatan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin

menggambarkan sebagaimana aslinya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian “Evaluasi Tata kelola Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah”

B. Fokus Penelitian

Guna mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitian. Spradley dalam Sugiono (2014:208) menyatakan bahwa “*a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang lebih teliti. Menurut Moleong (2007:94) melalui fokus penelitian, peneliti akan tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional plaza Bandar Jaya yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

yang difokuskan pada empat unsur pokok menurut teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu:

1. Efektivitas

Adalah hubungan antara output dengan tujuan. Dalam artian apakah pengolaan pasar tradisional plaza Bandar Jaya telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan pasar tradisional.

2. Efesiensi

Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan presiden yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pembangunan plaza Bandar Jaya telah menimbulkan dampak yang baik dibandingkan dengan pasar tradisional Bandar Jaya terdahulu.

3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam artian bahwa apakah pengadaan plaza Bandar Jaya beserta pengelolaannya telah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar lampung tengah, terutama para pedagang lama yang

telah berada di pasar tradisional Bandar Jaya dan masyarakat sekitar yang menjadi konsumen tetap di plaza Bandar Jaya ataukah justru pengadaan ini menimbulkan permasalahan baru.

4. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Yang artinya bahwa bagaimana tanggapan atau respon masyarakat sekitar Lampung Tengah yang menjadi target atau sasaran utama dalam pengadaan dan pengelolaan plaza Bandar Jaya, apakah bernilai positif (memuaskan kebutuhan) atau bernilai negatif (menimbulkan masalah).

C. Lokasi Penelitian

Proses yang perlu dilakukan dalam menentukan lapangan penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantive dan dengan mempelajari lebih dalam tentang focus penelitian serta rumusan masalah penelitian. Serta dengan pertimbangan dari segi geografis dan praktis baik dari segi pertimbangan waktu, biaya, tenaga perlu dipertimbangkan dengan menetapkan lokasi penelitian.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar Lampung Tengah dan Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah. Peneliti memilih Dinas Pasar Lampung Tengah dan plaza Bandar Jaya dengan alasan bahwa Plaza ini merupakan hasil upaya pemerintah daerah dalam rangka pengadaan pelayanan masyarakat melalui

revitalisasi pasar tradisional Bandar Jaya sebelumnya yang memang telah ada di lokasi yang sama melalui dinas pasar sebagai penanggung jawab dalam pengadaanya. Namun, setelah 15 Tahun lebih adanya plaza ini, kini justru timbul berbagai permasalahan baru yang diduga akibat buruknya pengelolaan pasar tradisional Plaza Bandar Jaya ini. Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang, permasalahan yang kini ditimbulkan di antaranya adalah mahalnya tarif sewa/beli kios dalam plaza, pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan, kemacetan, dan permasalahan sampah. Dan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih lokasi ini untuk melakukan evaluasi berdasarkan teori evaluasi dari William N. Dunn apakah dalam pelaksanaan tata kelola plaza ini telah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pengelolaan pasar yang secara umum tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2010:308) mengungkapkan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di

jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Menurut Sutopo (2006:9), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi *interview* dan observasi berpartisipatif, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi takberpartisipatif, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan.

Menurut Creswell dalam Tresiana (2013:87) menyebutkan setidaknya ada 3 (tiga) aspek penting prosedur dalam pengumpulan data, di antaranya:

1. Menetapkan batas-batas penelitian.
2. Mengumpulkan informasi melalui pengamatan, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan visual.
3. Menetapkan aturan untuk mencatat informasi.

Studi pustaka dilakukan dengan mencari data penunjang dari berbagai literature yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti membaca dan mempelajari laporan penelitian, jurnal, maupun berbagai media cetak yang memuat artikel. Adapun sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi Buku, Jurnal, Media massa, dan Berbagai dokumen yang berada di lingkungan Dinas pasar kabupaten Lampung Tengah.

Dalam Sugiono (2010:309) disebutkan terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperanserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*), dan dokumentasi.

a. Pengumpulan Data dengan Observasi

Nasution dalam Sugiono (2010:310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dengan bantuan teknologi, baik benda yang sangat kecil hingga benda-benda di luar angkasa dapat diobservasi dengan jelas. Dalam Sugiono, Marshall (1995) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data yang utama dipakai adalah observasi, khususnya observasi partisipatif yang melibatkan informan dan wawancara, yang keduanya bahkan boleh dibilang merupakan suatu kemutlakan (Tresiana, 2013:87).

Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiono (2010:310) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*obvert observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*). Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan observasi partisipan, yaitu dengan turun langsung kedalam pasar, mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pasar, mencari informasi melalui obrolan ringan pedagang maupun pembeli yang ada dalam pasar tradisional Plaza Bandar Jaya. Oekan dalam Tresiana (2013:88) mengungkapkan bahwa observasi partisipatif adalah satu-satunya metode yang dijalankan penelitian kualitatif untuk melukiskan hal-hal penting sebagai berikut: (a) apa yang terjadi; (b) menyengkut tentang apa dan siapa; (c) dimana dan kapan sesuatu itu terjadi; (d) bagaimana sesuatu itu terjadi; dan (e) mengapa sesuatu itu terjadi sesuai pandangan/menurut versi partisipan, bukan menurut peneliti

Dalam pelaksanaan penelitian ini, observasi dilakukan secara mendalam dengan melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung yaitu instansi terkait pada Dinas Pasar Lampung Tengah. Selain itu juga dilakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gejala-gejala maupun gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis

mendalam mengenai permasalahan tata kelola yang terdapat dalam Plaza Bandar Jaya.

b. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Estenberg dalam Sugiono (2010:317) mendefinisikan bahwa *interview* atau wawancara merupakan “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint constructing of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topic tertentu. Susan Stainback (1988) dalam Sugiono (2010:318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga obserasi dan interview terjadi seolah tanpa rekayasa dan berjalan secara alami (*natural observation*).

Esterberg (2002) dalam Sugiono (2010:319) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

1. Wawancara Terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karenanya, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta alternative jawaban yang juga telah disiapkan. Melalui wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpulan data. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti atau pengumpul data harus membawa alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara agar lebih lancar.

2. Wawancara Semiterstruktur (*Semistrukture interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semiterstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap

untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak berstruktur sering digunakan dalam pendahuluan penelitian, di mana dalam wawancara ini peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat memastikan permasalahan sebenarnya yang terjadi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mewakili setiap tingkatan dalam objek. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

Dari berbagai macam wawancara yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini peneliti lebih tertarik dan akan melakukan wawancara tidak terstruktur. Di mana dalam pelaksanaannya yang akan dilakukan bebarengan dengan observasi. Melalui wawancara tidak terstruktur diharapkan penelitian ini akan berjalan secara alami. Sehingga berbagai informasi dan data yang diinginkan akan diperoleh secara natural tanpa ada rekayasa.

Tabel 2. Daftar Informan

No.	Informan	Jabatan	Tanggal
1.	Bapak Edison S.	Bidang Umum dan Kepegawaian	17 Maret 2016
2.	Bapak Suyono	Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar	30 Maret 2016
3.	Ibu Fitri	Pedagang di Plaza Bandar Jaya	3 April 2016
4.	Ibu Ningsih	Pedagang di Plaza Bandar Jaya	3 April 2016
5.	Ibu Indri	Pedagang di Plaza Bandar Jaya	3 April 2016
6.	Ibu Siti	Pedagang di Plaza Bandar Jaya	3 April 2016
7.	Ibu Lita	Pengunjung Plaza Bandar Jaya	3 April 2016
8.	Ibu Busmiati	Pengunjung Plaza Bandar Jaya	3 April 2016

Sumber: diolah oleh peneliti, 2016

c. Pengumpulan Data dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa foto, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:240).

Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan record. Guba dan Lincoln (1981) dalam Moleong (2007:216) mendefinisikan seperti berikut: *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akunting. Sedangkan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dalam hal ini, dokumen dibedakan menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dalam penelitian kali ini, peneliti membutuhkan dokumentasi untuk melengkapi data dalam analisis yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen yang mendukung seperti media massa (Koran, majalah, dan internet), buku-buku, serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

E. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil

wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

a. Reduksi Data (*reduction data*).

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi ; perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian evaluasi tata kelola pasar tradisional plaza Bandar Jaya ini, data yang diperoleh kemudian dipilih, diseleksi dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tata kelola plaza ini yang nantinya akan dievaluasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks

naratif yang mendeskripsikan bagaimana permasalahan tata kelola plaza Bandar jaya yang kemudian dievaluasi.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Moelong, 2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Untuk memeriksa kebenaran data, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan. Hal yang dapat dilakukan juga dengan menyertakan kecukupan teori atau referensi untuk menguji analisis dan penafsiran data.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

c. Kebergantungan (*Dependality*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai

d. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Merupakan salah satu kabupaten yang terkurung daratan/land lock di provinsi Lampung. Kabupaten ini terletak sekitar 75 kilo meter dari ibukota provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan dapat ditempuh dari ibukota selama sekitar 1,5 jam dengan memakai Bus atau Mobil. Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi lebih kecil. Lampung Tengah dibagi atas Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal seluas 4.789,82 Km² yang terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat

Letak Kabupaten Lampung Tengah cukup strategis dalam konteks pengembangan wilayah. Sebab selain dilintasi jalur lintas regional, baik yang menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, juga persimpangan antara jalur Sumatera Selatan via Menggala dan jalur Sumatera Selatan serta Bengkulu via Kotabumi. Bagian selatan jalur menuju ke Kota Bandar Lampung, bagian timur menuju jalan ASEAN, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Sementara bagian barat jalur menuju Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus serta jalur lintas kereta api jurusan Bandar Lampung-Kertapati, Palembang.

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2014 berjumlah 1.227.185 jiwa, atau meningkat sebesar 2,1 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2013 yang berjumlah 1.202.252 jiwa. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2014 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 625.215 jiwa dan penduduk perempuan 601.970 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2014 rasio jenis kelamin 104, artinya pada Tahun 2014 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE), atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada 2014 mencapai sebesar 6,22 persen. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat

dilihat dari tingkat pendapatan per kapita penduduk pada setiap tahunnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2014 sebesar Rp 20.377.600,00 atau meningkat 10,90 persen dibanding Tahun 2013 sebesar Rp 18.375.369,00.

B. Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah

1. Profil Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah

Sebagai salah satu instansi/SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang berdiri sendiri, Dinas Pasar menjadi bagian dari unit kerja pemerintahan daerah yang menangani urusan pasar khususnya pasar daerah. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah KABUPATEN Lampung Tengah.

Sebagai penjabaran dari peraturan daerah tersebut, Bupati Lampung Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Lampung Tengah. Berdasarkan Peraturan Bupati inilah SKPD Dinas Pasar menjalankan tugas pokoknya dalam rangka mengatur, mengurus dan mengelola pasar-pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang hingga saat ini berjumlah 9 pasar yang tersebar di 9 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

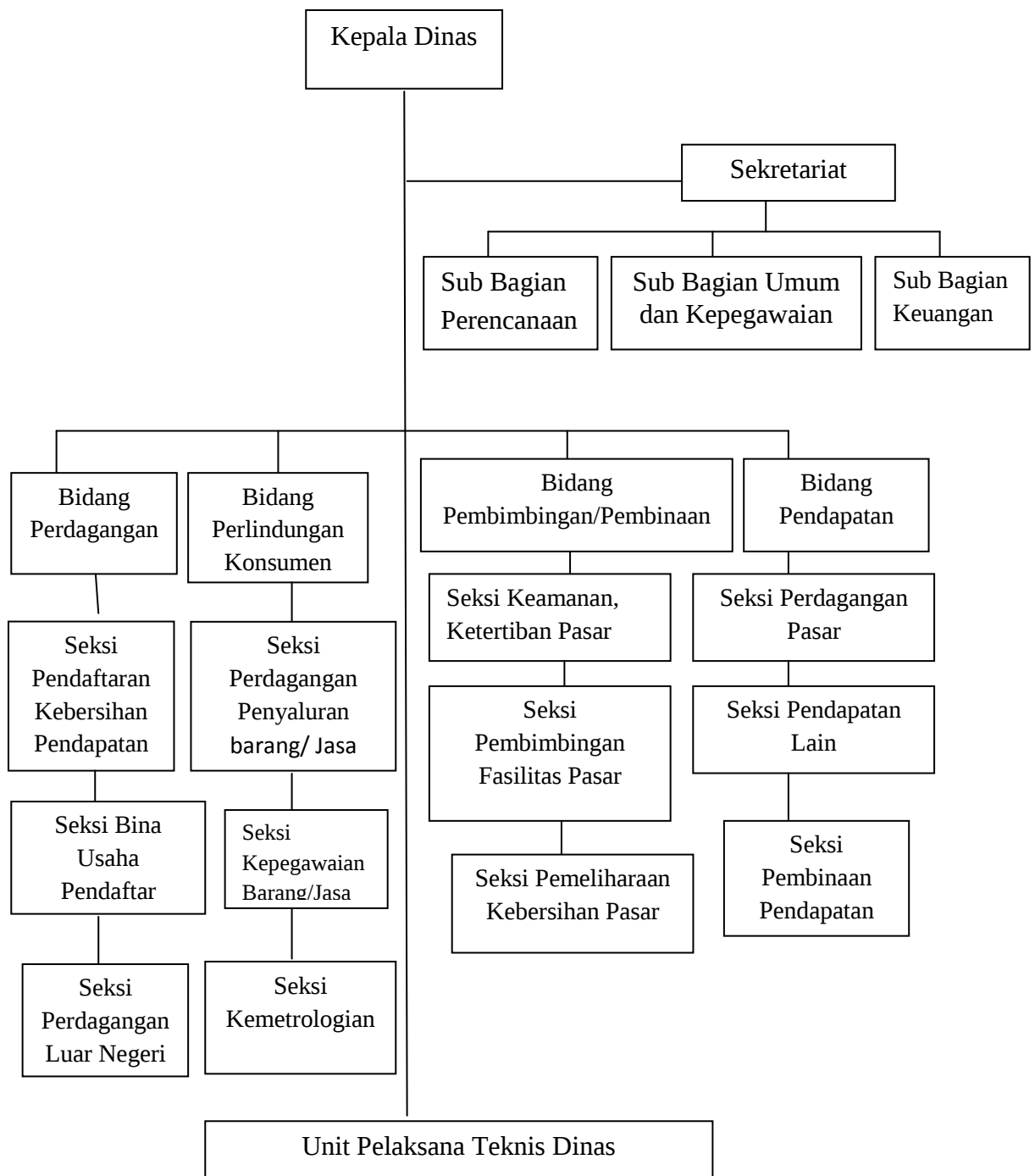
Sesuai dengan isi peraturan tersebut, Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan menyelenggarakan

tugas pokok sebagian urusan urusan pemerintahan dibidang pasar, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah

berikut adalah struktur organisasi di Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala-kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas:

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pasar Lampung Tengah



Sumber: Dinas Pasar Lampung Tengah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pasar dibantu oleh Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala UPTD dan satuan perangkat tugas di bawah masing-masing satuan kerja di Dinas Pasar.

Untuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar Daerah yang berada di bawah kendali Kepala Dinas terdiri atas: UPTD Pasar Daerah Bandar Jaya yang membawahi Pasar Bandar Jaya dan Pasar Wates, UPTD Pasar Daerah Kota Gajah yang membawahi pasar Kota Gajah dan Pasar Trimurjo, UPTD Pasar Daerah Rumbia yang membawahi Pasar Rumbia dan Pasar Seputih Surabaya, UPTD Pasar Daerah Seputih Mataram, UPTD Pasar Daerah Kalirejo dan UPTD Pasar Daerah Seputih Banyak. Penggabungan dua pasar di bawah pengurusan satu UPTD dilaksanakan atas dasar efisiensi pelaksanaan pekerjaan mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di Dinas Pasar.

Kantor Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah memiliki karyawan PNS/ASN sejumlah 33 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdiri dari 25 orang karyawan laki-laki dan 8 orang perempuan.
- Sebanyak 8 orang memiliki kepangkatan/golongan IV. Selanjutnya 16 orang karyawan telah memasuki kepangkatan/golongan III, kemudian sebanyak 8 pegawai masuk dalam kepangkatan/golongan II dan 1 orang PNS berpangkat/golongan I.
- Dilihat dari tingkat pendidikan, sebanyak 4 orang PNS di Kantor Dinas Pasar telah memiliki pendidikan setingkat S2. Untuk pegawai yang berlatar belakang pendidikan S1 berjumlah 13 orang dan jumlah pegawai

yang berpendidikan SMA/SLTA/Sederajat berjumlah 15 orang. Untuk pegawai yang berpendidikan SMP/Sederajat berjumlah 1 orang.

Untuk karyawan di Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah yang berstatus Honorer/Tenaga Kontrak berjumlah 142 orang. Dari keseluruhan jumlah karyawan yang berstatus honorer tersebut, sebanyak 15 orang ditempatkan di Kantor Dinas pasar dan selebihnya tersebar di kantor UPTD-UPTD pasar.

C. Gambaran Umum Pasar Tradisional Bandar Jaya Plaza

Gedung Plaza Bandar Jaya merupakan lokasi utama yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah dengan nama Pasar Daerah Bandar Jaya. Berlokasi di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Gedung Plaza ini telah menjadi *icon* Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Semenjak dibangun kembali pada awal tahun 2001 dengan menggunakan pola kerjasama dengan pihak swasta (Investor/Pengembang Swasta), Pasar Bandar Jaya Plaza telah menjadi pionir kerjasama Pemerintah Daerah dengan pengembang swasta sebagai pihak ketiga dalam mengembangkan pasar milik Pemerintah Daerah. Pasar Pemerintah Daerah ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Bupati Andi Achmad Sampurna Jaya yang bekerja sama dengan PT Kitita Alami, salah satu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bidang pengembangan pasar berbasis di Jakarta.

Sejak diresmikan pada tanggal 15 Mei 2003, Pasar Bandar Jaya mulai beroperasi dengan pedagang lebih dari 1.600 orang dan luas bangunan yang mencapai 22.000 meter persegi. Pengelolaan pasar ini awalnya dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT Kitita Alami, perumusan yang membangun Plaza ini. Namun sayangnya perusahaan ini kini mengalami kebangkrutan. Pasar Daerah Bandar Jaya yang meskipun telah dibangun secara modern/memiliki bangunan yang dapat dikategorikan modern, namun pasar ini masih dapat dikatakan sebagai pasar tradisional karena sistem jual beli barang di keseluruhan pasar ini masih menggunakan sistem jual beli yang tradisional/harga ditetapkan berdasarkan proses tawar menawar.

Diawal pembangunannya, plaza Bandar Jaya dipersiapkan beroperasi di dua lantai dan memungkinkan untuk pemanfaatan lantai ketiga. Namun hingga saat ini, hanya lantai 1 yang berfungsi sementara lantai 2 dan 3 tersebut belum dapat digunakan dikarenakan belum selesai dibangun. Sejak tahun 2015, pengelolaan plaza Bandar Jaya kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui UPTD yang ada di Pasar Bandar Jaya Plaza. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, untuk kebersihan pasar dilaksanakan atau ditangani oleh karyawan Dinas Pasar yang ditempatkan di kantor UPTD pasar Bandar Jaya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka dapat disimpulkan berdasarkan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan pasar tradisional ini yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar poin utama yang telah disebutkan di atas belum tercapai dan terlaksana dengan baik, seperti kebersihan dan kehygienisan, keamanan serta harga kios dan toko di dalam plaza yang masih terbilang cukup tinggi dan tidak mampu dijangkau oleh semua pedagang yang sejak dulu telah menempati pasar ini yang seharusnya menurut kebijakannya menjadi prioritas dalam penempatan pedagang di dalam plaza.

b. Efisiensi

Dari keterangan tersebut diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efesiensi sumber daya manusia yang terdapat pada Dinas Pasar belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat masih banyak permasalahan yang terjadi dikarenakan belum atau kurangnya sumber daya manusia yang menanganinya. Seperti permasalahan sampah yang menumpuk akibat karyawan yang sedikit sehingga tidak semua sampah dapat diangkut dan diselesaikan dalam satu hari sekaligus. Namun hal ini berbeda dengan efesiensi waktu. Kendati pihak Dinas Pasar masih pesimis karena masih banyak sekali permasalahan klasik yang belum dapat terselesaikan dengan baik, namun baik para pedagang maupun pengunjung merasa bahwa saat ini keadaan plaza dengan pengelolaanya saat ini sudah terbilang cukup baik, yang artinya bahwa efesiensi waktu yang digunakan pihak pengelola sudah cukup baik dalam usaha penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.

c. Kecukupan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan yang terjadi di Plaza Bandar Jaya. Hal ini diungkapkan oleh pihak Dinas Pasar yang menyatakan bahwa masih banyak berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Kendati demikian pihak mereka telah melakukan usaha maksimal untuk dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi di Plaza Bandar Jaya ini. Namun, walaupun pernyataan negatif dari pihak pengelola tersebut rupanya tidak sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh pedagang dan pengunjung pasar. Mereka

mengungkapkan bahwa keadaan plaza saat ini dinilai sudah cukup baik untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Terlebih keberadaan plaza yang sangat strategis, sangat membantu mereka untuk dapat menjangkaunya lebih mudah. Dari keterangan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ini telah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat walaupun masih banyak sekali permasalahan yang segera membutuhkan penanganan.

d. Responsivitas

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa bahwa sepanjang perjalanan dari keberadaan plaza ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat, terutama masyarakat sekitar plaza yang sangat terbantu dengan keberadaan plaza saat ini. Kendati masih banyak terjadi permasalahan klasik baik di dalam maupun di sekitar plaza, hal ini tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk datang ke Plaza Bandar Jaya. Para pedagang dan pengunjung plaza mengungkapkan bahwa mereka sudah cukup puas dengan keberadaan plaza ini. Plaza ini membawa rezeki bagi warga sekitar. Selain itu, mereka juga memberikan respon positif terhadap pengelolaan saat ini yang dirasa sudah lebih baik dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pihak pengelola mengenai kebijakan pengelolaan pasar ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Agar pengelola pasar lebih memahami lagi apa yang menjadi dasar dan pedoman mereka dalam melaksanakan pengelolaan pasar, terutama pasar tradisional Plaza Bandar Jaya.
2. Sebaiknya pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pasar sebagai pihak pengelola memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kebijakan pengelolaan pasar tersebut, agar para pedagang sebagai penghuni utama Plaza Bandar Jaya ini lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama mereka berjualan di dalam Plaza Bandar Jaya. Seperti hak dalam mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama berada di dalam plaza serta kewajiban mereka untuk turut andil menjaga kebersihan serta membayar retribusi kepada pemerintah.
3. Sebaiknya Dinas Pasar selaku pihak pengelola pasar dapat menambah anggaran tahunan mereka agar dapat menambah karyawannya. Terutama karyawan kebersihan dan keamanan yang setiap hari berada dilapangan untuk menangani permasalahan langsung yang terjadi di Plaza Bandar Jaya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Plaza Bandar Jaya bisa semakin diminimalisir.

4. Selaku pihak pengelola pasar yang lebih memahami permasalahan lapangan, sebaiknya Dinas Pasar melakukan upaya-upaya dalam pembenahan keadaan baik di dalam dan sekitar plaza. Seperti melakukan pengajuan permohonan kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat guna perbaikan jalan di sekitar plaza yang telah lama rusak, perbaikan drainase agar air limbah dapat mengalir dengan baik dan tidak menggenang di sekitar plaza, memperbaiki permasalahan sampah yang kerap kali telat untuk diangkut, serta pengupayakan penataan pedagang ditengah jalan plaza untuk di tata menjadi lebih rapi dan teratur lagi.
5. Sebaiknya pengelola dapat segera memaksimalkan pemanfaatan ruang plaza yang telah lama tidak digunakan sejak lama. Seperti pemanfaatan lantai 2 plaza yang tidak pernah digunakan agar bisa dimanfaatkan dengan menempatkan para pedagang yang berjualan disepanjang sebagian badan jalan yang berada di sekitar plaza yang tentu saja dengan harga jual yang lebih terjangkau oleh pedagang kecil. Atau dengan cara pembayaran yang lebih mudah diakses oleh pedagang kecil agar bisa menempati plaza lantai 2 tersebut, seperti misalnya dengan cara pembayaran kredit atau penyicilan yaitu dengan cara pembayaran yang dilakukan beransur setiap harinya, yang dirasa lebih bisa dijangkau oleh mereka para pedagang kecil disekitar plaza. Agar permasalahan-permasalahan seperti kemacetan, sampah, dan lingkungan kumuh disekitar plaza dapat segera teratasi

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali Mufiz. 1999, *Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta,:Universitas Terbuka Depdikbud.
- Arikunto, Suharsimi. 2013, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005, *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisi Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Press.

Sumber Kebijakan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Sumber Skripsi

Arini, Isti. 2011. Evaluasi kebijakan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung (studi di Kecamatan Kedaton tahun 2009-2010). Bandar Lampung: Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung

Sumber Internet

<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> di akses pada 28 september 2015

[http://www.academia.edu/8915601/bayoe_pramesona TATA KELOLA](http://www.academia.edu/8915601/bayoe_pramesona_TATA_KELOLA) di akses pada 28 september 2015

www.scribd.com/doc/115097125/Pedoman-Umum-Manajemen-Pengelolaan-Pasar di akses pada 30 September 2015

<http://www.lampungtengahkab.go.id> di akses pada 2 maret 2016